



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KAB. TANAH LAUT**

**Laporan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah**

**TAHUN
2023**



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.1.1 Penjelasan Umum	1
1.1.2 Perencanaan Pembangunan.....	3
1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal.....	4
BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	
2.1. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.....	6
2.1.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	6
2.1.2. Indikator Kinerja Kunci Keluaran.....	7
2.1.3. Indikator Kinerja Kunci Hasil.....	8
2.1.4. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	9
BAB III PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL	
3.1. Jenis Pelayanan Dasar	26
3.2. Target pencapaian	26
3.3. Realisasi	27
3.4. Alokasi Anggaran.....	29
3.5. Dukungan Personil.....	31
3.6. Permasalahan dan Solusi.....	31
BAB IV PENUTUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Jumlah ASN Pergolongan / Pendidikan Tahun 2023	3
Tabel 1.2.	Kebijakan Strategis Yang Diambil Dalam Satu Tahun Anggaran.....	5
Tabel 2.1.	Capaian Program, Kegiatan Sub Kegiatan BPBD.....	6
Tabel 2.2	Capaian IKK Output	8
Tabel 2.3.	Capaian IKK Outcome	9
Tabel 2.4.	Tabel Target dan Capaian IKM BPBD Kab. Tanah Laut.....	10
Tabel 2.5.	Realisasi Keuangan Sasaran Strategis.....	10
Tabel 2.6.	Realisasi IKU Sekretaris	12
Tabel 2.7.	Perbandingan Realisasi IKU Sekretaris Dengan Tahun Sebelumnya	13
Tabel 2.8.	Realisasi IKU Kasi PK.....	17
Tabel 2.9.	Perbandingan Realisasi IKU Kasi PK Dengan Tahun Sebelumnya.....	17
Tabel 2.10.	Realisasi IKU Kasi KL	20
Tabel 2.11.	Perbandingan Realisasi IKU Kasi KL Dengan Tahun Sebelumnya.....	20
Tabel 2.12.	Realisasi IKU Kasi RR	23
Tabel 2.13.	Perbandingan Realisasi IKU Kasi RR Dengan Tahun Sebelumnya	23
Tabel 3.1	Target SPM Sub-Bencana	26
Tabel 3.2	Capaian Target SPM Sub Urusan Bencana	27
Tabel 3.3	Alokasi Anggaran Penunjang.....	30

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. SDM BPBD Kab. Tanah Laut.....	31
---	----

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.1.1. Penjelasan Umum

Kabupaten Tanah Laut terletak pada posisi 114°30'20 BT – 115°23'31 BT dan 3°30'33 LS - 4°11'38 LS dengan batas-batas administratif sebagai berikut : Wilayah Utara berbatasan dengan Kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru, Wilayah Timur berbatasan dengan Kabupaten Tanah Bumbu, Wilayah Selatan dan Wilayah Barat berbatasan dengan Laut Jawa.

Luas wilayah Kabupaten Tanah Laut adalah 3.631,35 km² (363.135 ha) atau sekitar 9,71% dari luas Provinsi Kalimantan Selatan. Daerah yang paling luas adalah Kecamatan Jorong dengan luas 628,00 km², kemudian Kecamatan Batu Ampar seluas 548,10 km² dan Kecamatan Kintap dengan luas 537,00 km², sedangkan kecamatan yang luas daerahnya paling kecil adalah Kecamatan Kurau dengan luas hanya 127,00 km². Berdasarkan tingkat kelandaiannya wilayah Kabupaten Tanah Laut dapat diklasifikasikan ke dalam empat kelompok, yaitu wilayah datar (kemiringan 0-2%) sebesar 290.147 ha, wilayah bergelombang (kemiringan 2-15%) sebesar 43.060 ha, wilayah curam (kemiringan 15-40%) sebesar 26.833 ha dan wilayah sangat curam (kemiringan >40%) sebesar 12.890 ha.

Kondisi geografis wilayah Kabupaten Tanah Laut, sebagian merupakan dataran rendah dengan curah hujan yang tidak menentu, sehingga sistem pengaliran air yang terdiri dari sungai dan anak sungai alamiah serta sistem saluran drainase tidak mampu menampung debit air kiriman dari sungai yang berhulu di Kabupaten Tetangga yang mengakibatkan banjir hampir secara rutin setiap tahunnya.

Kondisi sungai yang semakin dangkal dan menyempit serta berkurangnya daerah resapan air, sangat berkontribusi meningkatkan debit air. Jika terjadi curah hujan yang cukup tinggi, air akan mengalir ke pemukiman penduduk karena ruas sungai secara alamiah kapasitasnya terlampaui dan mengakibatkan banjir, sehingga potensi bencana yang sering terjadi di Kabupaten Tanah Laut adalah bencana banjir, juga bencana kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut, sebagaimana tercantum dalam Pasal 26B ayat (1) dan (2), Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi secara adil dan setara, sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
- b. menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanggulangan bencana;
- e. melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- f. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan pada setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- g. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- h. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- i. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26B, pada Pasal 26C disebutkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan fungsi :

- (1) perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien.
- (2) pengkoordinasian pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Jumlah ASN pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut terhitung pada bulan Desember 2023 adalah 19 (sembilan belas) orang sebagaimana tercantum pada tabel berikut :

Tabel 1.1
Jumlah ASN Pergolongan / Pendidikan Tahun 2023

PNS Golongan				PPPK	Total	Pendidikan							Total
IV	III	II	I			S2	S1	D-III	D-II	SLTA	SLTP	SD	
1	8	8	-	2	19	-	6	2	-	11	-	-	19

1.1.2. Perencanaan Pembangunan

Visi Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 adalah “ *Terwujudnya Tanah Laut Yang Berinteraksi* ”, dimana Berinteraksi adalah akronim dari Berkarya, Inovasi, Tertata, Religius, Aktual, Sinergi.

Visi Kabupaten Tanah Laut merupakan kondisi yang diharapkan dapat memotivasi seluruh *elemen* masyarakat dalam melakukan aktivitasnya. Untuk mencapai visi tersebut, maka dirumuskan 5 (lima) misi pembangunan sebagai berikut:

- Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.
- Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif.
- Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).
- Meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kehidupan masyarakat.
- Membangun sinergitas yang baik antartingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Operasionalisasi tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut dalam mendukung pencapaian visi pembangunan Tanah Laut 2018 - 2023 selaras dengan misi ke-2, ke 3 dan ke 5 yaitu :

- ***Misi 2. “ Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif “***

Adapun penjabaran dari misi tersebut adalah menciptakan inovasi dalam pelayanan kebencanaan melalui penggunaan peralatan yang telah terbukti untuk meningkatkan kualitas pelayanan Kebencanaan.

- ***Misi 3 “ Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)”***

Adapun penjabaran dari misi tersebut adalah menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik untuk meningkatkan pelayanan kebencanaan di Kabupaten Tanah laut

- ***Misi 5 “Membangun sinergitas yang baik antartingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat”***

Adapun penjabaran dari misi tersebut adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007, tentang Penanggulangan Bencana bahwa penanganan penanggulangan bencana merupakan urusan bersama pemerintah, masyarakat, dunia usaha, organisasi non pemerintah internasional, serta seluruh pemangku kepentingan lainnya, sehingga Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut harus membangun sinergitas yang baik dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan.

1.1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Kebijakan yang diambil oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut pada Tahun 2023 dalam menyelesaikan masalah masyarakat yang strategis untuk menanggulangi bencana baik bencana alam (banjir, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan, serta kekeringan) serta bencana non alam (Penetapan Status Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Kebijakan strategis tersebut yaitu :

Tabel 1.2. Kebijakan Strategis Yang Diambil Dalam Satu Tahun Anggaran

No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
1.	Pembentukan Tim Operasional Penanganan Bencana BPBD Tahun 2023	Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/72-KUM/2023	Uraian Tugas Tim Operasional Penanganan Bencana
2.	Besaran Honorarium Tim Operasional Penanganan Bencana Tahun 2023	Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/73-KUM/2023	Honorarium Penanganan Bencana per orang, per kejadian, maksimal penanganan di laksanakan sebanyak 17 orang berdasarkan surat tugas.
3.	Keputusan Bupati Tanah tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan, Kekeringan dan Penurunan Produksi Pangan di Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023	Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/796-KUM/2023	Penetapan Status Siaga dalam rangka pencegahan terjadinya Karhutla dan kabut asap yang ditimbulkannya serta mengantisipasi dampak bencana kekeringan di Kabupaten Tanah Laut.
4.	Pembentukan Pos Komando dan Pos Lapangan serta penunjukan satuan tugas siaga Penanganan Bencana asap akibat kebakaran Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan, Kekeringan dan Penurunan Produksi Pangan di Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023	Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/878-KUM/2023	Susunan personil dan uraian tugas pos komando siaga penanganan terjadinya Karhutla di Kabupaten Tanah Laut.
5.	Penetapan Perpanjangan kedelapan (terakhir) status Transisi Darurat Kepemulihan Penanganan Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kab. Tanah Laut	Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/987-KUM/2022	Status Transisi Darurat Kepemulihan Penanganan Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten Tanah Laut selama 120 hari
6.	Instruksi Bupati Tanah Laut Tentang Distribusi Air Bersih Untuk Masyarakat Kabupaten Tanah Laut Yang Mengalami Krisis Air Bersih	Instruksi Bupati Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2023	Penanggulangan krisis air bersih dalam masyarakat memnuhi kebutuhan sehari hari melalui seluruh SKPD lingkup Kabupaten Tanah Laut melaksanakan distribusi air bersi bagi masyarakat yang membuntuhkan

BAB II
CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

2.1.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 2.1 Capaian Program, Kegiatan Sub Kegiatan BPBD

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN Rp	REALISASI Rp
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.671.970,-	3.636.070,-
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	878.033,-	829.200,-
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.550.596.421,-	2.209.735.809,-
Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2.150.277,-	1.612.400,-
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.956.153,-	1.538.220,-
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	61.412.761,-	53.493.840,-
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.136.255,-	1.581.306,-
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.528.952,-	9.760.000,-
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	10.000.000,-	10.000.000,-
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	174.855.000,-	169.855.360,-
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	99.490.810,-	87.155.000,-
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	73.105.539	42.707.342
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.028.441.868	994.445.111

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN Rp	REALISASI Rp
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	37.000.000,-	36.865.300,-
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	288.500.000,-	288.414.502,-
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	116.315.000,-	115.232.155,-
1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		
Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota		
Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	25.298.720,-	19.170.400,-
Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		
Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	28.401.091,-	19.814.400,-
Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota		
Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kontijensi	300.000.000,-	240.895.000,-
Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		
Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	85.967.710,-	74.640.000,-
Sub Kegiatan, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	76.920.000,-	67.005.000,-
Sub Kegiatan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	29.244.471,-	22.508.200,-
Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		
Sub Kegiatan Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	84.853.421,-	56.355.000,-

2.1.2. Indikator Kinerja Kunci Keluaran

Capaian Indikator Kinerja Kunci Keluaran (IKK Output) yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 2.2 Capaian IKK Output

NO	IKK OUTPUT	CAPAIAN	SUMBER DATA	KET
1	Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	100%	BPBD	
2	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	235 Orang	BPBD	
1	Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	100%	BPBD	
2	Persentase penyelesaian dokumen Rencana Kontinjensi sampai dinyatakan sah / legal	100%	BPBD	
3	Persentase sejumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	0,095%	BPBD	
4	Persentase warga negara yang ikut pelatihan	0,095%	BPBD	
5	Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	45,7%	BPBD	
6	Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	0%	BPBD	
1	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	0%	BPBD	Tidak terjadi KLB sepanjang 2023
2	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	0%	BPBD	Tidak ada Penetapan Status darurat
3	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	100%	BPBD	
4	Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	100%	BPBD	

2.1.3. Indikator Kinerja Kunci Hasil

Capaian Indikator Kinerja Kunci Hasil (IKK Outcome) yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 2.3 Capaian IKK Outcome

No	IKK Outcome	Capaian	Sumber	Ket.
1	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	0,095%	BPBD	
2	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	0,095%	BPBD	
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	45,7%	BPBD	

2.1.4. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Capaian Kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja adalah :

a. Capaian Kinerja Kepala Pelaksana

Sasaran Strategis Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut (Eselon III) sesuai dengan rencana strategis BPBD Kab. Tanah Laut Tahun 2018-2023 adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap masyarakat yang terdampak bencana, adapun capaian Indeks Kepuasan Masyarakat yang terdampak bencana pada tahun 2023 sebesar 88,00.

Capaian indeks kepuasan masyarakat pada tahun 2023 diperoleh melalui survey kepada penerima layanan yang dilaksanakan oleh BPBD Kab. Tanah Laut selama 4 triwulan, setiap triwulannya dilakukan pengukuran indeks kepuasan masyarakat (IKM) yang dilaksanakan oleh Sekretariat BPBD Kab. Tanah Laut dengan menyerahkan sebanyak 150 (seratus lima puluh) kuesioner kepada masyarakat yang terdampak bencana. Pada Triwulan I BPBD Kab. Tanah Laut memperoleh nilai 88,06, kemudian pada Triwulan II memperoleh nilai 88,13, pada Triwulan III memperoleh nilai 87,56, dan pada Triwulan IV memperoleh nilai 88.

Adapun perbandingan Indeks Kepuasan Masyarakat dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4 Target dan Capaian IKM BPBD Kab. Tanah Laut

Indikator Kinerja	Target Kinerja					Capaian Kinerja			
	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,15 (Baik)	85,25 (Baik)	86,50 (Baik)	87,55 (Baik)	87,55 (Baik)	82,81 (Baik)	83,82 (Baik)	84,50 (Baik)	87,93 (Baik)

Dari tabel 2.4 tersebut dapat kita lihat bahwa terjadi peningkatan capaian kinerja pada tahun 2023 sebesar 3,43 atau sebesar 4,05 %. Persentasi capaian kinerja tahun 2023 (88) terhadap target kinerja pada tahun 2023 (87,55) adalah sebesar 100,41%, sedangkan persentasi capaian kinerja tahun 2023 (87,93) terhadap target akhir restra (87,55) adalah sebesar 100,41%

Keberhasilan capaian Indikator Kinerja Utama Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 dilakukan melalui 2 (dua) Program yang terdiri atas 10 (sepuluh) kegiatan dan 23 (dua puluh tiga) Sub Kegiatan dengan realisasi sebagai berikut :

Tabel 2.5 Realisasi Keuangan Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Program Uraian	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Capaian %
1	Meningkatnya pelayanan penanggulangan bencana terhadap masyarakat	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.461.039.039,-	4.026.861.615,-	90,27
		Program Penanggulangan bencana	630.685.413,-	500.388.000,-	79,34
		J U M L A H	5.091.724.452,-	4.527.249.615,-	88,91

Dari tabel 2.5 diatas dapat dilihat bahwa target indikator sasaran dengan hasil 100,41% dan anggaran yang terealisasi sebesar 88,91% sehingga terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar 11,09%. Hal tersebut terjadi karena adanya penggunaan teknologi dan informasi oleh BPBD Kab. Tanah Laut seperti penggunaan alat komunikasi radio yang memudahkan dalam penyampaian informasi dan penyusunan kaji cepat bencana, sehingga informasi yang didapat tanpa harus melakukan observasi ke lapangan dan jumlah sarana prasarana yang diturunkan ke lapangan sudah sesuai dengan kebutuhan.

Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut tahun 2023 sesuai target yang telah ditetapkan, tidak lepas dari usaha seluruh aparaturnya yang ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut, pelaksana kebijakan dan pelaksana program kegiatan dengan baik.

Adapun program kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- Pelaksanaan kebijakan Instruksi Bupati Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Distribusi Air Bersih Untuk Masyarakat Kabupaten Tanah Laut Yang Mengalami Krisis Air Bersih. Selama pelaksanaannya tidak kurang dari 2 juta liter air yang didistribusikan.
- Penanganan pada 288 kejadian kebakaran lahan dan hutan dengan luas lahan yang terbakar kurang lebih 602,92 ha.
- Pemberian bantuan logistik bagi masyarakat yang terkena bencana.

Salah satu ruang lingkup pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut pada Tahun 2023 yang perlu ditingkatkan dikarenakan selalu menjadi penilaian yang terendah adalah kesesuaian produk layanan. Kesesuaian produk pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Walaupun selalu mendapatkan predikat baik akan tetapi pada saat dilakukan survey akan selalu menjadi peringkat terakhir dalam hasil penilaian.

Salah satu kendala dalam pencapaiannya adalah pada layanan pemberian logistik untuk korban bencana. Masyarakat masih merasa apa yang diberikan pemerintah daerah kepada korban bencana tidak sesuai dengan ekspektasi. Masyarakat mengharapkan bantuan yang diberikan sesuai dengan analisis dampak kerugian akibat bencana dan pemerintah daerah tidak memiliki kemampuan keuangan dalam memulihkan seluruh dampak kerugian akibat bencana tersebut.

Pemerintah Daerah telah membuat program dalam mitigasi bencana agar kerugian dampak bencana dapat diperkecil serta melakukan pemulihan dampak bencana di bidang fasilitas umum terlebih dahulu.

Adapun kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi kerugian dampak bencana antara lain adalah :

- Dengan menindaklanjuti laporan dari masyarakat terhadap bencana yang datang dan merespon kaji cepat yaitu waktu minimal untuk menanggulangi bencana (1 x 24) jam.
- Mendistribusikan secepat mungkin logistik kepada masyarakat yang terdampak bencana maksimal 1 (satu) hari setelah terjadi bencana.
- Melakukan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi terkait bencana di daerah rawan bencana.
- Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi vertikal terkait bantuan bagi masyarakat yang terdampak bencana.

b. Capaian Kinerja Sekretaris

Sasaran strategis Sekteraris BPBD tahun 2023 adalah meningkatkan kualitas pelayanan administrasi organisasi dengan 7 (tujuh) Indikator Kinerja Utama sebagaimana berikut :

Tabel 2.6. Realisasi IKU Sekretaris

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Capaian	Persentase Capaian	
1	Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi organisasi	1	Persentase pelayanan administrasi perkantoran sesuai SOP	100%	100%	100%
		2	Jumlah Sarana dan Prasarana yang dipelihara dan dapat di fungsikan	25 Buah	25 Buah	100%
		3	Jumlah Administrasi kepegawaian yang dikelola sesuai ketentuan	5 Dokumen	5 Dokumen	100%
		4	Jumlah event yang di ikuti	2 Pameran	1 Pameran	50%
		5	Jumlah Dokumen perencanaan dan keuangan sesuai aturan	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
		6	Persentase Laporan Keuangan yang tersusun dengan baik dan tepat waktu	100%	100%	100%
		7	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SKPD	Baik	Baik	100%

Perbandingan capaian Indikator Kinerja Utama Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2023

dengan capaian Indikator Kinerja Utama Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.7 Perbandingan Realisasi IKU Sekretaris Dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	Capaian		Peningkatan
	2022	2023	
Persentase pelayanan administrasi perkantoran sesuai SOP	100%	100%	0%
Jumlah Sarana dan Prasarana yang dipelihara dan dapat di fungsikan	23 Buah	25 Buah	15%
Jumlah Administrasi kepegawaian yang dikelola sesuai ketentuan	5 Dokumen	5 Dokumen	0
Jumlah event yang di ikuti	1 Pameran	1 Pameran	0
Jumlah Dokumen perencanaan dan keuangan sesuai aturan	3 Dokumen	3 Dokumen	0
Persentase Laporan Keuangan yang tersusun dengan baik dan tepat waktu	100%	100%	0
Nilai Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah SKPD	Baik	Baik	0

Seluruh capaian Indikator Kinerja Utama Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2023 telah memenuhi target yang telah ditetapkan, terkecuali 1 (satu) Indikator Kinerja Utama yang masih belum mencapai target yaitu jumlah event pameran pemerintah daerah. Sesuai target tahun 2023 jumlah event pameran pemerintah daerah yang diikuti adalah 2 (dua) pameran yaitu Pameran Hari Jadi Kabupaten Tanah Laut dan Pameran Anggrek Pemerintah Kabupaten Tanah Laut. Sedangkan pada tahun 2023 BPBD Kab. Tanah Laut hanya mengikuti 1 (satu) event pameran hari jadi Kabupaten Tanah Laut. Hal tersebut dikarenakan untuk pameran Anggrek Pemerintah Kabupaten Tanah Laut tidak jadi dilaksanakan.

Adapun sasaran strategis yaitu meningkatkan kualitas pelayanan administrasi organisasi, capaian sasaran ini telah dilaksanakan melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 4.461.039.039,- terealisasi sebesar Rp. 4.026.861.615,- atau 90,27% dengan kegiatan dan sub kegiatan :

- a) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 4.550.003,- terealisasi sebesar Rp. 4.465.270,- atau 98,14% dengan Sub Kegiatan :
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 3.671.970,- terealisasi sebesar Rp. 3.636.070,- atau 99,02%
 - 2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 878.033,- terealisasi sebesar Rp. 829.200,- atau 94,44%
- b) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 2.552.746.698,- terealisasi sebesar Rp. 2.211.348.209,- atau 86,63% dengan Sub Kegiatan:
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan anggaran sebesar Rp. 2.550.596.421,- terealisasi sebesar Rp. 2.209.735.809,- atau 86,64%
 - 2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 2.150.277,- terealisasi sebesar Rp. 1.612.400,- atau 74,99%
- c) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 260.889.121,- terealisasi sebesar Rp. 246.228.726,- atau 94,38% dengan sub kegiatan :
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 1.956.153,- terealisasi sebesar Rp. 1.538.220,- atau 78,63%
 - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 61.412.761,- terealisasi sebesar Rp. 53.493.840,- atau 87,11%
 - 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan anggaran sebesar Rp. 2.136.255,- terealisasi sebesar Rp. 1.581.306,- atau 74,02%
 - 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan anggaran sebesar Rp. 10.528.952,- terealisasi sebesar Rp. 9.760.000,- atau 92,70%
 - 5) Penyediaan Bahan/Material dengan anggaran sebesar Rp. 10.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 10.000.000,- atau 100%

- 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 174.855.000,- terealisasi sebesar Rp. 169.855.360,- atau 97,14%
- d) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 99.490.810,- terealisasi sebesar Rp. 87.155.000,- atau 87,60%
- e) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 1.101.547.407,- terealisasi sebesar Rp. 1.037.152.453,- atau 94,15% dengan sub kegiatan :
 - 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan anggaran sebesar Rp. 73.105.539,- terealisasi sebesar Rp. 42.707.342,- atau 58,42%
 - 2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 1.028.441.868,- terealisasi sebesar Rp. 994.445.111,- atau 96,69%
- f) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 441.815.000,- terealisasi sebesar Rp. 440.511.957,- atau 99,71% dengan sub kegiatan :
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan anggaran sebesar Rp. 37.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 36.865.300,- atau 99,64%
 - 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan dengan anggaran sebesar Rp. 288.500.000,- terealisasi sebesar Rp. 288.414.502,- atau 99,97%
 - 3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 116.315.000,- terealisasi sebesar Rp. 115.232.155,- atau 99,07%

Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut dalam melaksanakan tugas dan fungsinya didukung SDM yang berkualitas walaupun dengan keterbatasan sarana dan prasarana yang tersedia, namun semangat dan kerja keras dari aparatur di lingkungan

Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut yang terdiri dari pelaksana ASN sebanyak 7 (tujuh) orang dan Non ASN sebanyak 2 (dua) orang yang siap membantu dan melayani tugas dan fungsi yang dibutuhkan Organisasi.

Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik serta rata-rata telah tercapai sebesar 100%, sedangkan capaian realisasi anggaran untuk itu hanya terealisasi sebesar 90,27% sehingga terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar 9,73%.

Adapun kendala yang dialami oleh Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut adalah Struktur Organisasi Tata Kelola Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut masih mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dimana Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten/Kota dengan typologi B adalah Pejabat Struktural Eselon IV/a dan tidak memiliki Kepala Sub Bagian, sehingga hal tersebut membuat bebannya menjadi besar dengan beban tugas perencanaan, keuangan, pelaporan, umum, kepegawaian, kearsipan serta pengadaan barang dan jasa tanpa ada pejabat struktural yang membantu. Sedangkan beban kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten/Kota sudah setara dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang lain.

c. Capaian Kinerja Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Sasaran Strategis Kepala Seksi Pencegahan Dan Kesiapsiagaan tahun 2023 adalah meningkatkan partisipasi aparatur dan masyarakat dalam penanggulangan bencana, berupa penyediaan peralatan, logistik dan penanganan rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana dengan 6 (enam) indikator kinerja utama sebagai berikut :

Tabel 2.8. Realisasi IKU Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian	
1	Meningkatkan partisipasi aparatur dan masyarakat dalam penanggulangan bencana, berupa penyediaan peralatan, logistik dan penanganan rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana.	1	Jumlah Masyarakat/kelompok masyarakat yang mengikuti Sosialisasi.	160 orang	235 orang	146,88%
		2	Jumlah Tenaga TRC /Pusdalops yang mengikuti pelatihan dan bersertifikat	25 orang	5 orang	20%
		3	Jumlah daerah Rawan Bencana	11 kec	11 Kec	100%
		4	Jumlah Laporan Kegiatan forum PRB	1 Laporan	1 Laporan	100%
		5	Jumlah Dokumen Bencana yang Tersedia	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		6	Jumlah Desa Tangguh Bencana yang di bina	2 Desa	2 Desa	100%

Sedangkan perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada tahun 2023 dengan capaian tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.9. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Utama Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	Capaian		Peningkatan
	2022	2023	
Jumlah Masyarakat/kelompok masyarakat yang mengikuti Sosialisasi	0	235 orang	235%
Jumlah Tenaga TRC / Pusdalops yang mengikuti pelatihan dan bersertifikat	26 orang	5 orang	0
Jumlah Daerah rawan bencana	11 Kec	11 Kec	0
Jumlah laporan kegiatan forum PRB	1 Laporan	1 Laporan	0
Jumlah Dokumen Bencana yang tersedia	1 Dokumen	1 Dokumen	0
Jumlah Desa Tangguh Bencana yang di bina	0	2 Desa	0

Pada Tahun 2023 Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan indikator kinerja utama antara lain :

- Pelaksanaan Sosialisasi Komunikasi Informasi dan Edukasi Mitigasi Bencana kepada warga/masyarakat/kelompok masyarakat yang berada di daerah rawan bencana sebanyak 235 orang dari target 160 orang.

Adapun mitigasi bencana yang disosialisasikan adalah bencana banjir dan bencana kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan yang mana jenis bencana tersebutlah yang sering terjadi di wilayah Kabupaten Tanah Laut. Sumber dana kegiatan sosialisasi KIE tidak hanya berasal dari APBD akan tetapi juga dibantu melalui APBDesa yang berada di wilayah rawan bencana.

- Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut melalui Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan tidak dapat melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas tenaga TRC/Pusdalops pada tahun 2023. Hal tersebut karena keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh BPBD Kab. Tanah Laut sehingga untuk capaian kinerja tidak maksimal. Capaian indikator jumlah TRC/Pusdalops yang dilatih hanya sebanyak 5 (lima) orang dari target 26 (dua puluh enam) orang. Adapun sumber dana untuk 5 (lima) orang anggota TRC/Pusdalops yang mengikuti pelatihan berasal dari APBD Provinsi Kalimantan Selatan.
- BPBD telah memiliki Kajian Resiko Bencana (KRB) Kabupaten Tanah Laut Tahun sejak tahun 2018 yang disusun oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana bersama BPBD Kab. Tanah Laut. KRB Kab. Tanah Laut nantinya akan dilakukan review pada tahun 2024.
- Berdasarkan Kajian Resiko Bencana (KRB), daerah rawan bencana di Kabupaten Tanah Laut berjumlah 11 (sebelas) kecamatan. BPBD Kab. Tanah Laut melalui Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan melakukan monitoring secara periodik ke seluruh daerah rawan bencana tersebut.
- Pada tahun 2023 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut melaksanakan Rapat Forum Pengurangan Resiko Bencana (PRB) terkait penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan yang terjadi pada pertengahan hingga akhir tahun 2023.
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut melalui Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan melakukan pembinaan ke Desa yang telah dan akan ditetapkan sebagai desa tangguh bencana. Hal ini sesuai dengan Peraturan Kepala Badan

Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1/2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana.

Adapun desa yang dibina adalah Desa Ranggung Kecamatan Takisung dan Desa Sungai Rasau Kecamatan Bumi Makmur.

Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam mencapai Indikator Kinerja Utamanya didukung oleh anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut yang terdiri dari 2 (dua) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan antara lain :

- a) Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota sub kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) dengan anggaran sebesar Rp. 25.298.720,- terealisasi sebesar Rp. 19.170.400,- atau 75,78%.
- b) Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana dengan anggaran sebesar Rp. 328.401.091,- terealisasi sebesar Rp. 260.709.400,- atau 79,39% dengan Sub Kegiatan:
 - 1) Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 28.401.091,- terealisasi sebesar Rp. 19.814.400,- atau 69,77%
 - 2) Penyusunan Rencana Kontijensi dengan anggaran sebesar Rp. 300.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 240.895.000,- atau 80,30%

Beberapa hal yang menjadi hambatan Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam pencapaian target antara lain kurangnya anggaran yang diberikan untuk menunjang pencapaian target kinerja, sehingga tidak bisa melaksanakan kegiatan yang bersentuhan dengan masyarakat. Hambatan lainnya adalah kurangnya personil yang ada di Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan yang hanya dibantu oleh 1 (satu) orang Analis Bencana, 1 (satu) orang Pengemudi Mobil Pemadam Kebakaran, dan 1 (satu) orang Pegawai Non ASN.

d. Capaian Kinerja Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik

Sasaran strategis Kepala Kedaruratan dan Logistik tahun 2023 adalah meningkatkan partisipasi aparatur dan masyarakat dalam penanggulangan bencana, berupa penyediaan peralatan, logistik dan

penanganan rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana dengan 4 indikator kinerja utama sebagaimana berikut :

Tabel 2.10. Realisasi IKU Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	Meningkatkan partisipasi aparatur dan masyarakat dalam penanggulangan bencana, berupa penyediaan peralatan, logistik dan penanganan rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana	Jumlah jenis Bencana yang di layani	7 Jenis	4 Jenis	85%
		Jumlah logistik yang diterima oleh korban yang terdampak bencana	350 paket	63 Paket	46%
		Jumlah sarana dan prasarana kebencanaan yang terpenuhi	30 buah	136 buah	273%
		Jumlah laporan kejadian bencana	12 laporan	12 laporan	100%

Sedangkan perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik pada tahun 2023 dengan tahun 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.11. Perbandingan Realisasi IKU Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	Capaian		
	2021	2022	2023
Jumlah jenis Bencana yang di layani	7 Jenis	6 Jenis	4 Jenis
Jumlah logistik yang diterima oleh korban yang terdampak bencana.	140 Paket	86 Paket	63 Paket
Jumlah sarana dan prasarana kebencanaan yang terpenuhi	52 buah	136 buah	136 Buah
Jumlah laporan kejadian bencana	12 laporan	12 laporan	12 Laporan

Dari kedua tabel 2.11 diatas, dapat dijelaskan terkait capaian kinerja Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik sebagai berikut :

1. Sesuai dengan Kajian Resiko Bencana Kab. Tanah Laut bahwa potensi bahaya bencana di Kabupaten Tanah Laut terdapat 7 (tujuh) jenis bencana yaitu banjir, banjir bandang, cuaca ekstrim, gelombang

ekstrim dan abrasi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan serta tanah longsor. Jumlah jenis bencana yang di layani tahun 2023 hanya sebanyak 4 (empat) jenis yaitu banjir, cuaca ekstrim, kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan. Pada tahun 2023 tidak terjadi kejadian bencana tanah longsor. Kejadian banjir pada tahun 2023 di Kabupaten Tanah Laut sebanyak 13 (tiga belas) kali kejadian di 3 (tiga) Kecamatan dengan total korban yang terdampak sebanyak 6.893 jiwa. Kebakaran hutan dan lahan terjadi sebanyak 288 kejadian dengan lahan yang terbakar seluas 605,42 Ha. Kejadian bencana cuaca ekstrim terjadi sebanyak 9 (sembilan) kali sepanjang tahun 2023 dan untuk bencana kekeringan terjadi di seluruh Kecamatan di Kabupaten Tanah Laut dan berdampak kepada seluruh masyarakat. Adapun langkah yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam menanggulangi bencana kekeringan adalah dengan mendistribusikan air bersih kurang lebih sebanyak 2 (dua) juta liter yang dilaksanakan oleh seluruh SKPD dan BUMD serta sektor swasta kepada masyarakat Kabupaten Tanah Laut yang terdampak bencana tersebut.

2. Jumlah logistik yang diterima korban terdampak bencana untuk bantuan korban bencana pada tahun 2023 berjumlah 63 paket yang didistribusikan kepada masyarakat yang terdampak bencana berupa paket sembako dari pengadaan APBD Kabupaten Tanah Laut, dari BPBD Provinsi Kalimantan Selatan dan Bantuan dari BNPB. Puting beliung, kebakaran pemukiman, banjir. Minyak goreng 1 (satu) liter, mie instan 1 (satu) dus, sarden 1 (satu) kaleng, susu 1 (satu) kaleng, gula 1 (satu) kg, teh 1 (satu) kotak, kecap 1 (satu) botol, kopi 1 (satu) bungkus, telur 1 (satu) kg, air mineral 1 (satu) dus, beras 5 (lima) kg, terpal 1 (satu) buah. Logistik yang dianggarkan di DPA sebanyak 30 paket, sisanya dibantu oleh BPBD Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Jumlah sarana dan prasarana kebencanaan yang terpenuhi pada Tahun 2022 sebanyak 136 buah yang dibeli baik melalui Dana APBD Kabupaten Tanah Laut.
4. Jumlah laporan kejadian bencana pada tahun Tahun 2023 adalah 12 laporan atau setiap bulan data kejadian bencana berjumlah 1 laporan yang langsung dibuat oleh Pusat Pengendalian Operasi

Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) BPBD Kabupaten Tanah Laut dan di laporkan ke BPBD Provinsi Kalimantan Selatan seterusnya di lanjutkan ke BNPB Republik Indonesia.

Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik dalam melaksanakan tugas dan fungsi dibantu oleh 2 (dua) orang ASN dan 2 (dua) orang Pegawai Non ASN administrasi serta didukung oleh 27 Anggota Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Kab. Tanah Laut serta 2 (dua) orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Pranata Pencarian Pertolongan.

Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik ini didukung dengan anggaran pada Program Penanggulangan Bencana sebesar Rp. 682.785.776,- dan terealisasi sebesar Rp. 373.032.325,- atau 54,63% dengan Kegiatan dan sub kegiatan:

- 1) Kegiatan Pelayanan, Penyelamatan dan Evakuasi korban Bencana dengan anggaran sebesar Rp.192.132.181,- terealisasi sebesar Rp. 164.153.200,- atau 85,44% dengan sub kegiatan :
 - a) Respon Cepat Darurat Bencana kabupaten/kota dengan anggaran sebesar Rp. 85.967.710,- terealisasi sebesar Rp. 74.640.000,- atau 86,82%.
 - b) Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban Bencana Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 29.244.471,- terealisasi sebesar Rp. 22.508.200,- atau 76,97%
 - c) Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 76.920.000,- terealisasi sebesar Rp. 67.005.000,- atau 87,11%

Walaupun hampir seluruh target yang telah ditetapkan telah dipenuhi, akan tetapi terdapat beberapa kendala baik dalam pemenuhan target maupun penentuan Indikator Kinerja Utamanya. Penentuan indikator Kinerja Utama di Seksi Kedaruratan dan Logistik agak sulit dicapai karena capaiannya sangat tergantung dengan kejadian bencana yang sangat tidak bisa diprediksi, maka pada tahun berikutnya akan diadakan perbaikan indikator kinerja utama. Selain penentuan indikator, penentuan targetnya pun juga sangat sulit dikarenakan hal yang sama.

Kendala yang kedua adalah kurangnya anggota Tim Reaksi Cepat (TRC) yang memenuhi syarat dalam melakukan kaji cepat sehingga tidak dapat menganalisis kebutuhan peralatan dan logistik yang harus dibawa pada saat penanganan bencana.

e. Capaian Kinerja Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Sasaran strategis Kepala Rehabilitasi dan Rekonstruksi tahun 2023 adalah Meningkatkan partisipasi aparatur dan masyarakat dalam penanggulangan bencana, berupa penyediaan peralatan, logistik dan penanganan rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana dengan 3 indikator kinerja utama sebagaimana berikut :

Tabel 2.11. Realisasi IKU Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	Meningkatkan partisipasi aparatur dan masyarakat dalam penanggulangan bencana, berupa penyediaan peralatan, logistik dan penanganan rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana	Jumlah koordinasi pasca bencana	3 kali	3 kali	0
		Jumlah Lokasi yang terdampak pasca bencana	11 Kec	11 Kec	100%
		Jumlah Desa/Kec yang Rehabilitasi melalui pelatihan, pendekatan sosial, Psikologis, ekonomi dan budaya pasca bencana.	4 Desa / Kec	4 Desa / Kec	0

Sedangkan perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada tahun 2023 dengan capaian tahun 2022 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.12. Perbandingan Realisasi IKU Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	Capaian		Peningkatan
	2022	2023	
Jumlah koordinasi pasca bencana	0	3 kali	300%
Jumlah Lokasi yang terdampak pasca bencana	11 Kec	11 Kec	0
Jumlah Desa/Kec yang Rehabilitasi melalui pelatihan, pendekatan sosial, Psikologis, ekonomi dan budaya pasca bencana.	0	4 Desa / Kec	400%

Pada tahun 2023 Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi memenuhi target indikator kinerja utamanya sehingga terjadi peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam melaksanakan tugas telah didukung oleh anggaran pada kegiatan penataan sistem dasar penanggulangan bencana sub kegiatan penanganan pascabencana kabupaten/kota dengan anggaran sebesar Rp. 84.853.421,- dan terealisasi sebesar Rp. 56.355.000,- atau sebesar 66,41%.

Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam melaksanakan tugas dibantu oleh 1 (satu) orang ASN yaitu Pengadministrasi Umum serta dibantu 1 (satu) orang Pegawai Non ASN dan 3 (tiga) orang anggota Pusat Pengendali Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB).

Kegiatan yang dilakukan oleh Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam mencapai ketiga indikator tersebut yaitu dengan menyusun Kajian Kebutuhan Pasca Bencana sesuai dengan amanat Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2017 Tentang Penyusunan Rencana Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pascabencana. Dalam penyusunan Jitupasna dilakukan dengan tahapan monitoring dan peninjauan ke lokasi bencana, kemudian melakukan pendataan terhadap korban bencana sampai dengan pendataan terhadap kerugian dampak bencana. Setelah data dikumpulkan maka dilakukan koordinasi dengan instansi terkait sesuai tugas dan fungsinya dalam melakukan pemulihan baik fisik dan psikis manusia serta infrastruktur fasilitas umum.

Pada kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, terhadap korban bencana di beberapa lokasi/wilayah terdampak bencana seperti di Kecamatan Kurau, Kecamatan Bumi Makmur, Kecamatan Bati Bati dan Kecamatan Takisung, sudah berjalan sesuai dengan perencanaan sebagaimana telah dikoordinasikan dengan BNPB, BPBD Provinsi, maupun SKPD teknis lainnya.

Adapun pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang dilakukan adalah pembangunan kembali rumah warga yang rusak akibat bencana bekerjasama dengan BNPB melalui dana siap pakai.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut secara langsung turun ke lapangan menemui para penyintas (korban bencana) dan memberikan motivasi serta bimbingan konseling guna pemulihan psikologis masyarakat yang terdampak bencana.

Hambatan yang ditemui Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam mencapai target capaian tidak jauh dari Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik yaitu kesulitan dalam penentuan indikator kinerja dan target kinerja. Oleh karena itu, pada tahun 2024 dilakukan perbaikan indikator dan target kinerja pada Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

BAB III PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

3.1. Jenis Pelayanan Dasar

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Tanah Laut adalah salah satu SKPD pengampu Standar Pelayanan Minimal pada Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Bencana.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, jenis pelayanan dasar Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota meliputi pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

3.2. Target pencapaian

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut dalam melaksanakan kegiatan untuk pemenuhan SPM menetapkan target sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun target yang ditetapkan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1 Target SPM Sub-Bencana

Indikator	Target	Satuan
Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)	1	Dokumen
Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	316.864	Orang
Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)	170	Orang
Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	2	Buah
Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, dll)	41	Unit
Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparatur yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)	25	Orang
Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana)	29	Orang
Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	2	SK Penetapan
Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas (terrespon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam)	1	Kejadian
Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	7	Orang
Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	79	Kali

3.3. Realisasi

Pada Tahun 2023 Badan Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Tanah Laut dapat melaksanakan pemenuhan SPM dengan capaian sebagai berikut :

Tabel 3.2 Capaian Target SPM Sub Urusan Bencana

Indikator	Satuan	Target	Realisasi
Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)	Dokumen	1	1
Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	Orang	316.864	316.864
Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)	Orang	316.864	316.864
Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	Buah	2	2
Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, dll)	Unit	41	41
Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparaturnya yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)	Orang	25	25
Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana)	Orang	29	29
Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	SK Penetapan	2	2
Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas (terrespon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam)	Kejadian	1	1
Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	Orang	7	7
Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	Kali	79	79

Realisasi pelaksanaan SPM Sub Urusan Bencana yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tanah Laut tahun 2023 sesuai target yang telah ditetapkan, tidak lepas dari usaha Aparatur yang ada di BPBD Kab. Tanah Laut serta pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan program kegiatan dengan baik.

Adapun program kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan SPM Sub Urusan Bencana tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- BPBD telah memiliki Kajian Resiko Bencana (KRB) Kabupaten Tanah Laut Tahun sejak tahun 2018 yang disusun oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana bersama BPBD Kab. Tanah Laut yang nantinya akan dilakukan review pada tahun 2024.
- Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terkait Penggunaan Aplikasi Kependudukan sehingga dapat mengidentifikasi seluruh penduduk yang berada di wilayah rawan bencana.
- Melakukan sosialisasi kepada seluruh penduduk yang berada di daerah rawan bencana melalui tatap muka sebanyak 235 orang dan melalui media sosial dan pembagian himbauan elektronik ke seluruh warga di daerah rawan bencana.
- Penyediaan Rambu Bencana pada Desa Sumber Mulya Kecamatan Pelaihari. Rambu bencana adalah keterangan yang ditempatkan atau dipasang di kawasan rawan bencana, berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduannya, yang berfungsi untuk menjelaskan atau memberi petunjuk, peringatan, dan larangan bagi setiap orang yang berada di kawasan rawan bencana. Penyediaan rambu tersebut menggunakan bahan seadanya berupa pipa besi bekas, hal tersebut dikarenakan pada tahun 2023 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut tidak memiliki anggaran dalam pengadaannya.
- Pada tahun 2023 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut melakukan pengadaan sarana prasarana penanggulangan bencana berupa mesin pompa air apung dalam rangka penanganan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kabupaten Tanah Laut. Pada tahun 2023 terjadi 288 kejadian kebakaran lahan dan hutan dengan luas lahan yang terbakar kurang lebih 602,92 Ha. Selain pengadaan mesin pompa apung, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut melakukan perbaikan jaringan komunikasi dan

pengadaan alat komunikasi (Handy Talkie). Alat ini berfungsi sebagai transceiver sekaligus receiver, sehingga alat ini dapat berkomunikasi dengan cara mengirimkan maupun menerima sinyal analog berupa suara dari suatu alat ke alat lainnya yang memudahkan dalam pelaksanaan penanggulangan bencana.

- Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut melaksanakan pelatihan bagi warga yang berada di daerah rawan bencana sebanyak 25 (dua puluh lima) orang yaitu di Desa Sungai Rasau Kecamatan Bumi Makmur dan Desa Ranggung Kecamatan Takisung.
- Aktivasi komando penanganan darurat bencana dilaksanakan berdasarkan Keputusan Bupati Nomor Laut Nomor 188.45/796-KUM/2023 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan, Kekeringan dan Penurunan Produksi Pangan di Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 dan Instruksi Bupati Tanah Laut Nomor 6 tahun 2023 Tentang Distribusi Air Bersih Untuk Masyarakat Kabupaten Tanah Laut Yang Mengalami Krisis Air Bersih.
- Pendataan terhadap warga yang menjadi korban akibat bencana pada tahun 2023 sebanyak 7 orang. Hal tersebut diakibatkan pembentukan Tim Jitupasna dilakukan pada tanggal Sehingga pendataan yang dilaksanakan tidak maksimal.
- Pelaksanaan pencarian pertolongan dan evakuasi terhadap warga yang terdampak bencana ataupun yang mengalami kecelakaan pada tahun 2023 sebanyak 79 orang.

3.4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut dalam rangka menunjang pemenuhan SPM adalah sebagai berikut

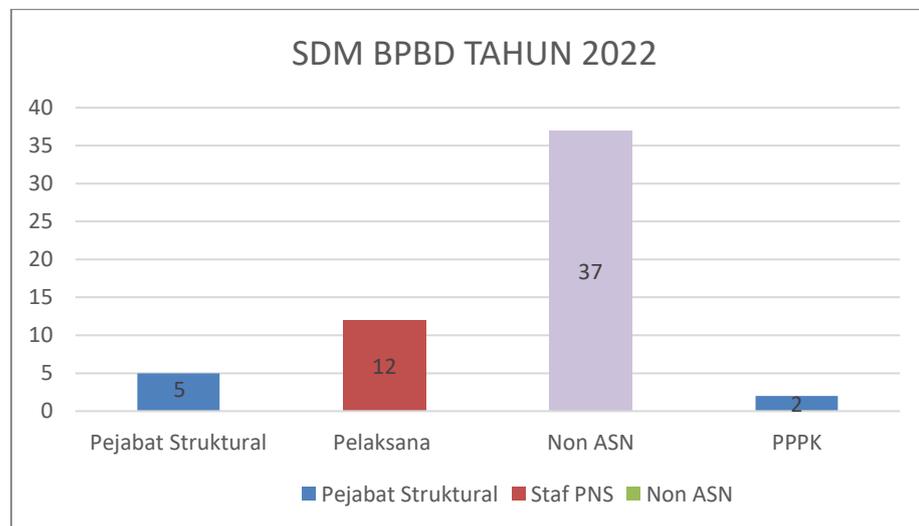
Tabel 3.3 Alokasi Anggaran Penunjang

Indikator	Sub Kegiatan	Anggaran	Jumlah Anggaran
Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)			
Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	174.855.000,-	174.855.000,-
Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)	Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	25.298.720,-	25.298.720,-
Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana			
Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, dll)	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	116.315.000,-	215.805.810,-
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	99.490.810,-	
Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparatur yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)	Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	28.401.091,-	28.401.091,-
Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana)	Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	85.967.710,-	85.967.710,-
Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	85.967.710,-	85.967.710,-
Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas (terrespon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam)	Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	85.967.710,-	85.967.710,-
Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	Sub Kegiatan Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	84.853.421,-	84.853.421,-
Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	Sub Kegiatan, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	76.920.000,-	76.920.000,-

3.5. Dukungan Personil

Capaian terhadap indikator SPM sebagaimana telah di paparkan sebelumnya tersebut diperoleh dengan efisiensi penggunaan sumber daya aparatur yang terlihat pada grafik berikut :

Gambar 3.1 SDM BPBD 2023



Berdasarkan pada Gambar 3.1 di atas terlihat bahwa terdapat 56 (lima puluh enam) orang pegawai pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut yang terdiri dari 17 (tujuh belas) orang Pegawai Negeri Sipil ditambah dengan 2 (dua) orang PPPK dan 37 (tiga puluh tujuh) orang Pegawai Non ASN yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut dengan sebutan Tenaga Administrasi 6 (enam) orang, Rescuer 25 (dua puluh lima) orang dan Pusdalops PB 3 (tiga) orang yang ditempatkan di kantor induk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut dan 3 (tiga) orang di Kecamatan Kintap.

3.6. Permasalahan dan Solusi

Realisasi pelaksanaan SPM Sub Urusan Bencana yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut tahun 2023 terdapat beberapa kendala sebagai berikut :

- Masih kurangnya anggaran yang tersedia untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan SPM Sub Urusan Bencana.
- Kurangnya pengetahuan dan kesadaran pelaksana terkait strategi pemenuhan SPM Sub Urusan Bencana.

- Klasifikasi SOTK Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut yang masih dalam klasifikasi B sehingga beban kerjanya hanya diampu oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut dengan Eselon III dan Sekretaris Eselon IV/a serta 3 (tiga) orang Kepala Seksi Eselon IV/a.
- Pengelolaan database kebencanaan di Kab. Tanah Laut masih bersifat manual dan sporadik yang belum terintegrasi lintas sektoral dalam satu sistem, terutama integrasi dengan database penduduk miskin dan rentan.

BAB IV PENUTUP

Berdasarkan pada pengukuran, evaluasi, dan analisis capaian kinerja yang telah dilakukan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut telah melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan sebagaimana tercermin dari capaian kinerja kegiatan dan sarasannya, sedangkan hasil capaian kinerja keuangan berdasarkan indikator input berupa sumber dana adalah 88,91% di mana dari jumlah anggaran sebesar Rp 5.091.724.452,- realisasinya sebesar Rp 4.527.249.615,-. Dengan pencapaian kinerja 88,91%. Pada sasaran ini berarti kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut tergolong pada **Kategori Baik**, hasil yang diperoleh ini tentu tidak terlepas dari kinerja seluruh aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut yang telah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dari hasil analisa tersebut dapat dilihat capaian kinerja program/kegiatan serta permasalahan dan alternatif solusi. Kondisi ini diantisipasi dengan cara melakukan evaluasi secara berkala atas kendala/hambatan yang dijumpai sehingga diketahui penyebab timbulnya hambatan-hambatan dalam pencapaian kinerja. Permasalahan yang dihadapi dan hal-hal yang tidak tercapai dalam pelaksanaan program/kegiatan tahun 2023 menjadi masukan bagi Badan Penanggulangan bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut untuk tahun selanjutnya.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut, semoga sasaran program yang belum tercapai seratus persen akan dievaluasi agar kendala yang dihadapi dapat dicari solusinya sedini mungkin, sehingga seluruh sasaran program tahun 2023 dapat dicapai dengan lebih baik dari tahun ketahun.

Pelaihari, Januari 2024

KEPALA PELAKSANA

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,



Ir. SAHRUDIN

Pembina Tingkat I (IV/a)

NIP. 19661210 199403 1 007